

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI SMA GADJAH MADA YOGYAKARTA

POLICY IMPLEMENTATION OF REGION WITHOUT CIGARETTE IN HIGH SCHOOL GADJAH MADA YOGYAKARTA

Oleh : Zismeda Taruna, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, zismeda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta, 2) faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru BK, wali kelas, siswa, dan karyawan SMA Gadjah Mada Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta sudah membentuk tim pelaksana beserta tugas masing-masing, tahap interpretasi menggunakan cara sosialisasi. Sosialisasi dilakukan saat rapat sekolah dan MOS. SMA Gadjah Mada sudah melakukan tahapan aplikasi dengan menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok berupa penetapan anggaran dan peralatan dengan melakukan sosialisasi dan sudah memasang tanda dilarang merokok. Faktor pengambat implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta terjadi pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta dapat dijumpai pada faktor sumber daya dan disposisi.

Kata kunci : implementasi, kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah

Abstract

This study aims to describe : 1) the implementation of policies in the region without cigarette in High School Gadjah Mada Yogyakarta, 2) supporting factors and the inhibiting factors implementation policy. The study used a qualitative approach is naturalistic. Subject in this study is the principal, vice principal, guidance and conseling teacher, homeroom teacher, student, and school employees in Gadjah Mada Yogyakarta. The results showed policy implementation of region without cigarette at the school of Gadjah Mada already formed an implementation team with their respective duties, the interpretation phase using means of socialization. Socialization is done at meetings and new student orientation. Gadjah Mada Yogyakarta High School have done the application stage by applying region without cigarette in the form of budgeting and equipment to socialize and put up a no smoking sign. Inhibiting factors the implementation policy of the region without cigarette at high school Gadjah Mada happen in cases of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Supporting factors the implementation policy of region without cigarette in the Gadjah Mada High Schools can be found on the disposition factors dan resources.

Keywords: implementation, policy of region without cigarette in school

PENDAHULUAN

Menteri Pendidikan mengeluarkan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah. Kebijakan ini ditetapkan untuk memberi dukungan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Tujuan dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah ini ditetapkan atas dasar melindungi para generasi muda yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dari paparan asap rokok yang berbahaya dan secara tidak langsung diharapkan menurunkan angka perokok pada pelajar.

Pada kenyatannya banyak perokok yang masih melanggar Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, dengan tetap merokok di area tersebut. Sering dijumpai pula pelanggaran tersebut terjadi di sekolah. Sekolah merupakan salah satu kawasan tanpa rokok, karena akan mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar. Beberapa guru, tenaga kependidikan bahkan kepala sekolah dengan santainya merokok di sekolah tanpa memikirkan akibat dari kebiasaan yang tidak baik tersebut. Efek dari kebiasaan itu adalah ketika para siswa yang melihatnya merasa bahwa merokok adalah hal yang wajar dilakukan. Anggapan tersebut sedikit banyak akan memberikan pengaruh bagi pelajar untuk mencoba merokok. Sebagian pelajar di Indonesia kini telah menjadi perokok aktif.

Hasil pra-observasi di SMA Gajah Mada menemukan beberapa siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Beberapa ada yang merokok di sekitar koridor sekolah, di ruang satpam, di

parkiran sepeda motor, dan di dalam kelas. Pihak sekolah membiarkan siswa yang merokok dan tidak ada sanksi yang tegas kepada para perokok tersebut. Contoh yang tidak bagus juga ditemukan adalah seorang guru yang merokok di lingkungan sekolah. Guru tersebut merokok di ruang guru yang tentu saja masih masuk dalam lingkungan sekolah. Dampak dari warga yang merokok di SMA Gajah Mada sangat mengganggu bagi mereka yang tidak merokok. Udara segar yang seharusnya mereka bisa nikmati menjadi tercemar akibat asap rokok

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta? Apakah faktor penghambat serta pendukung implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta?

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Pendidikan

Tilaar dan Riant Nugroho (2008:140) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Proses pembuatan kebijakan harus melalui tahapan yang urut dan tidak dapat dilakukan secara terpisah atau salah satu tidak dilakukan

karena tahapan dalam proses pembuatan kebijakan merupakan sebuah kesatuan. Pembuatan kebijakan harus mempunyai dasar teori agar sesuai dengan kebutuhan. Tahapan proses pembuatan kebijakan adalah tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (William N. Dunn 2003: 25). Penelitian ini lebih fokus untuk membahas implementasi kebijakan karena pada tahapan ini banyak faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan dapat berjalan baik atau tidak.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan mentransformasikan sebuah kebijakan ke dalam istilah operasional agar mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan dan objek kebijakan.

Charles O. Jones menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas atau tahapan yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan (Arif Rohman, 2009: 135). Ada tiga pilar aktivitas atau tahapan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yakni :

- 1) Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan.
- 2) Interpretasi, aktivitas menafsirkan agar suatu program menjadi rencana dan pengarahan

yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan sesuai harapan.

- 3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Implementasi merupakan tahapan yang vital dalam kebijakan. Model Edward III (Subarsono, 2012: 90-92) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan. Faktor penentu yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantara adalah komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi), sumberdaya (sumberdaya manusia, anggaran, peralatan, kewenangan), disposisi, dan struktur birokrasi.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat atau area yang ditetapkan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, mengkomersialkan, menawarkan, maupun mempromosikan produk tembakau. (Depkes.go.id)

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah

Untuk mendukung penyelenggaraan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, pihak sekolah wajib melakukan hal-hal sesuai dengan pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 64 Tahun 2015. Hal – hal yang perlu dilakukan sekolah adalah sebagai berikut:

Pasal 4 :

- a. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
- b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar Sekolah;
- c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di Lingkungan Sekolah;
- d. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di Lingkungan Sekolah; dan
- e. memasang tanda kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.

Pasal 5 :

- 1) Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah.
- 2) Kepala sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan Pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan Kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.
- 4) Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah

apabila terbukti ada yang merokok di Lingkungan Sekolah.

- 5) Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan Kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau Pihak lain.

Pasal 6 :

Larangan penjualan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan pasal 5 ayat (1) berlaku juga terhadap larangan penjualan permen berbentuk rokok atau benda lain yang dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi yang menyerupai rokok atau tanda apapun dengan merek dagang, logo, atau warna yang bisa diasosiasikan dengan produk/industri rokok.

Pasal 7 :

- 1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit dalam satu tahun.
- 2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan kepada walikota, bupati, gubernur, dan/atau menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Lexy J. Moleong (2009:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan persoalan pada subjek penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif naturalistik karena penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini bermaksud menjelaskan data dari keterangan-keterangan yang didapat dari lapangan berupa hasil observasi di lapangan, dokumentasi, dan wawancara kepada subjek yang diteliti saat pelaksanaan penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di SMA Gadjah Mada Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ibu Ruswo, Yudonegaran GM II/208. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2016. Secara garis besar SMA Gadjah Mada Yogyakarta tepat untuk penelitian ini karena di sekolah tersebut terdapat banyak siswa yang merokok di sekolah dan disediakan tempat khusus merokok di lingkungan sekolah.

Subjek dan Objek Penelitian

Narasumber pada penelitian ini yaitu:

1. Kepala SMA Gadjah Mada Yogyakarta sebagai pemimpin di sekolah.
2. Wakasek Kesiswaan SMA Gadjah Mada Yogyakarta sebagai koordinator pelaksanaan 7 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kesehatan, dan Kerindangan)
3. Guru Bimbingan dan Konseling SMA Gadjah Mada Yogyakarta selaku pihak yang berhubungan langsung dengan peserta didik dan mengurus kenakalan peserta didik.

4. Wali kelas SMA Gadjah Mada Yogyakarta selaku penyelenggara administrasi kelas termasuk di dalamnya tata tertib siswa
5. Siswa SMA Gadjah Mada Yogyakarta sebagai sasaran Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
6. Karyawan SMA Gadjah Mada Yogyakarta sebagai pihak lain yang mempengaruhi lingkungan sekolah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mempunyai tahap yang harus dilakukan setelah proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang baik yaitu : (1) *data reduction* (reduksi data), (2) *data display* (interpretasi data), (3) *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan untuk menguji kredibilitas informasi atas data yang diperoleh dari penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi data yaitu pengecekan data dengan membandingkan antara data yang diperoleh.

Pembandingan data yang sering dilakukan yaitu melalui berbagai sumber yang berbeda (M. Djunaidi, 2012: 322). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan KTR di SMA Gajah Mada Yogyakarta

a. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh SMA Gajah Mada untuk melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. SMA Gajah Mada sudah membentuk tim untuk melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Tim yang ditunjuk oleh sekolah beranggotakan Guru Bimbingan Konseling, Wali Kelas, Wakasek Kesiswaan, dan diawasi oleh Kepala Sekolah. Tim tersebut berkoordinasi sesuai dengan tugas masing-masing untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan. Tim pelaksana dan tugasnya dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tim pelaksana Kebijakan KTR di SMA Gajah Mada Yogyakarta

Jabatan	Tugas
Kepala Sekolah	Mengawasi pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok SMA Gajah Mada
Wakasek Kesiswaan	Koordinator pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok SMA Gajah Mada
Guru Bimbingan dan Konseling	Membimbing siswa ke arah yang lebih baik dan menegur siswa yang merokok sembarangan di sekolah
Wali Kelas	Memasang tanda dilarang merokok di kelas dan menegur siswa yang merokok di dalam kelas

Berdasarkan tabel di atas, tahap pengorganisasian untuk melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada sudah sesuai dengan teori pengorganisasian dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O Jones. Teori tersebut menjelaskan pada tahap pengorganisasian dilakukan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Pelaksanaan tahap pengorganisasian di SMA Gajah Mada sudah membuat tim pelaksana yang berasal dari sumber daya manusia yang ada. Tim pelaksana kebijakan juga diberikan tugas masing-masing untuk melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta.

b. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi di SMA Gajah Mada yang berkaitan dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menggunakan cara sosialisasi. Berikut tabel pelaksanaan tahapan

interpretasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta:

Tabel 2. Pelaksanaan tahapan interpretasi Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi tata tertib sekolah termasuk di dalamnya ada peraturan larangan merokok di sekolah	Awal tahun ajaran atau saat Masa Orientasi Sekolah
2	Sosialisasi Kebijakan KTR kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan	Rapat sekolah

Tahap interpretasi yang dilakukan oleh SMA Gadjah Mada sudah sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones. Sosialisasi pertama dilakukan kepada Guru saat rapat sekolah. Sosialisasi pertama dilakukan kepada Guru karena di sekolah ini pelaksana kebijakan yang ditunjuk adalah Guru. Guru dalam hal ini sudah termasuk Guru bimbingan konseling, Wakasek Kesiswaan, dan Wali Kelas. Pelaksana kebijakan diberikan sosialisasi bertujuan agar dapat memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Pemahaman dari pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Sosialisasi kedua dilaksanakan saat MOS dengan mengundang orang tua siswa. Penjelasan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dimasukkan saat penyampaian tata tertib sekolah. Tata tertib di SMA Gadjah Mada sudah mencantumkan larangan merokok. Pencantuman larangan tersebut ke dalam tata tertib sekolah telah

sesuai dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015

c. Tahap Aplikasi

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada pada tahap aplikasi sudah sesuai dengan teori Charles O. Jones. Pihak sekolah sudah menetapkan anggaran dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada. Penetapan anggaran dan peralatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Penetapan anggaran dan peralatan Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta

No.	Program	Penggunaan anggaran
1	Sosialisasi Kebijakan KTR yang sudah termasuk dalam tata tertib sekolah	Menggunakan anggaran MOS
2	Sosialisasi Kebijakan KTR saat rapat sekolah	Menggunakan anggaran rapat sekolah
3	Pengadaan tanda dilarang merokok	Menggunakan anggaran peralatan kelas

Peralatan yang digunakan untuk mendukung implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada berupa tanda dilarang merokok sesuai dengan Pergub DIY Nomor 42 tahun 2009, Perwal Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015, dan Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 yang mewajibkan pemasangan tanda dilarang merokok pada kawasan tanpa rokok termasuk sekolah. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut menggunakan dana sosialisasi dan pemasangan tanda dilarang

merokok menggunakan anggaran peralatan kelas.

Faktor Penentu Implementasi Kebijakan KTR di SMA Gajah Mada Yogyakarta

Model Edward III mengemukakan bahwa komunikasi kebijakan terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi transisi (*transmission*), dimensi kejelasan (*clarity*), dimensi konsistensi (*consistency*).

Komunikasi

a. Dimensi Transisi

Dimensi transisi dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dilakukan dengan cara sosialisasi saat MOS dan rapat sekolah.

b. Dimensi Kejelasan

Dimensi kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dilakukan dengan cara sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada, namun masih belum jelas karena ada siswa yang mengaku tidak tahu mengenai kebijakan tersebut serta ditemukan beberapa Guru yang merokok di sekolah.

c. Dimensi konsistensi

Dimensi konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dilakukan oleh pihak sekolah yang sudah memasukkan larangan merokok dalam tata tertib sekolah dan sudah berusaha menghilangkan area khusus merokok namun pelaksana tugas Kepala Sekolah mengaku setuju jika ada tempat khusus merokok di sekolah.

Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Saat ini jumlah pelaksana kebijakan di SMA Gajah Mada sudah memadai namun terkendala dengan beberapa Guru mengajar di sekolah lain yang memberikan akibat kurang lancarnya koordinasi antar pelaksana. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta menggunakan Guru Bimbingan dan Konseling karena pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam kenalakan pelajar. Wali Kelas dibantu oleh Wakasek Kesiswaan ikut mengawasi siswa agar tidak merokok di kelas.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumberdaya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok tidak dianggarkan secara khusus oleh pihak sekolah. Pihak sekolah tidak menganggarkan khusus karena tidak ada program khusus untuk menanggapi kebijakan tersebut.

c. Sumber Daya Peralatan

Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada sudah memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan untuk selebihnya menggunakan sumber daya manusia yang tersedia yaitu Guru Bimbingan Konseling dan Walikelas dibantu oleh Wakasek Kesiswaan. diawasi oleh Kepala Sekolah. Tidak ada peralatan lain dari sekolah karena tidak ada program khusus untuk menangani kebijakan tersebut.

d. Sumber Daya Kewenangan

Kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta adalah Kepala Sekolah, namun saat ini posisi tersebut digantikan oleh pelaksana tugas. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Sekolah belum bisa untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta. Belum ada keputusan dari Kepala Sekolah yang dapat mengontrol siswa maupun Guru merokok di sekolah. Jadi, kesiapan dari pihak sekolah masih kurang. Belum ada program dari sekolah yang mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok selain sosialisasi yang dilakukan pada tahun ajaran baru dan keseharian di sekolah. Belum adanya program lanjutan yang mendukung kebijakan tersebut secara tidak langsung Kepala Sekolah belum memaksimalkan jumlah dan keahlian anggota pelaksana kebijakan yang dimiliki oleh sekolah. Sarana pendukung yang dibuat sekolah berupa tanda tulisan dilarang merokok diacuhkan oleh sebagian Guru dan siswa.

Disposisi

Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta yang dapat dilihat pada saat wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan masih belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Kebijakan Kepala Sekolah

yang lama justru membuat suatu tempat khusus untuk merokok di kawasan sekolah. Kawasan tersebut terletak di dekat ruang guru dengan pohon kersen yang rindang cocok untuk bersantai sambil merokok.

Struktur Birokrasi

Pembagian tugas yang tidak terlalu rumit dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta ternyata masih belum bisa dimaksimalkan. Masih banyak pelanggaran yang terjadi di sekolah tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada upaya dari pihak sekolah yang mampu mengatasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan KTR di SMA Gajah Mada Yogyakarta

Faktor penghambat implementasi kebijakan KTR di SMA Gajah Mada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Faktor penghambat internal dalam pelaksanaan Kebijakan KTR di SMA Gajah Mada Yogyakarta

No	Jenis faktor	Dimensi	Penghambat
1.	Komunikasi	Kejelasan	Siswa mengaku tidak tahu adanya kebijakan KTR
		Konsistensi	Pihak sekolah menyediakan tempat khusus merokok di sekolah
2.	Sumber daya	Kewenangan	Belum ada program lanjutan yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan KTR

Lanjutan Tabel 4. Faktor penghambat internal dalam pelaksanaan Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta

3.	Disposisi		Beberapa guru tidak sejalan dengan Kebijakan KTR dan masih merokok di sekolah
			Pihak sekolah kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar Kebijakan KTR
			Keinginan guru dan siswa untuk merokok susah dikendalikan
4.	Struktur birokrasi		Kurangnya koordinasi sekolah dalam menanggapi kebijakan KTR

Faktor penghambat internal pelaksanaan kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta bersumber dari 4 aspek yang dikemukakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi terjadi pada dimensi kejelasan dan konsistensi. Faktor sumber daya terjadi pada dimensi konsistensi.

Tabel 5. Faktor penghambat eksternal pelaksanaan Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta

No	Jenis faktor	Penghambat
1.	Sumber daya	Siswa yang masuk ke SMA Gadjah Mada sebagian besar adalah pindahan dari sekolah lain yang dikeluarkan karena perilaku yang melanggar tata tertib.
2.	Sumber daya	Faktor keadaan keluarga (broken home, orang tua sibuk, ayah yang merokok) siswa yang membuat mereka menggunakan rokok sebagai pelarian untuk merokok
3.	Sumber daya	Pengaruh lingkungan dari masyarakat kepada siswa yang kurang baik

Faktor penghambat eksternal pelaksanaan Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada hanya ditemukan pada faktor sumber daya. Faktor sumber daya yang menghambat antara lain siswa yang masuk ke SMA Gadjah Mada memang seorang perokok dan faktor keadaan orang tua dan lingkungan ikut mempengaruhi kebiasaan merokok siswa.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada terdapat beberapa faktor yang mendukung. Faktor pendukung implementasi kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Faktor pendukung pelaksanaan Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta

No	Jenis faktor	Dimensi	Faktor Pendukung
1.	Sumber daya	Kewenangan	Keputusan sekolah untuk memasang tanda dilarang merokok di sekolah
			Pihak sekolah memasukkan aturan larangan merokok ke dalam tata tertib sekolah
2.	Disposisi		Kepala sekolah yang baru berusaha untuk menghilangkan kawasan khusus untuk merokok

Lanjutan Tabel 6. Faktor pendukung pelaksanaan Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta

			Sikap yang ditunjukkan oleh beberapa guru yang tidak suka jika ada yang merokok di sekolah baik itu guru maupun siswa
--	--	--	---

Faktor pendukung pelaksanaan Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta dapat ditemukan pada faktor sumber daya dan disposisi. Faktor sumber daya pendukung dapat ditemukan pada dimensi kewenangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. SMA Gadjah Mada Yogyakarta sudah melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan menetapkan tim pelaksana beserta tugasnya, anggaran dan peralatan serta telah melakukan sosialisasi kepada warga sekolah.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta yaitu terdapat pada faktor internal dan faktor eksternal dari sekolah tersebut. Faktor pendukung implementasi kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta yaitu berasal dari faktor sumber daya dan faktor disposisi.

Saran

1. Meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada tiap sekolah yang berada dalam naungan Dinas

Pendidikan Kota Yogyakarta dan pemberlakuan sanksi yang tegas untuk sekolah yang melanggarnya.

2. Meningkatkan komunikasi antar pelaksana dengan kelompok sasaran kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah dan meningkatkan kesadaran warga sekolah dengan pendidikan karakter. Guru ataupun tenaga kependidikan tidak merokok di lingkungan sekolah agar menjadi teladan bagi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sleman: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Cetakan VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tilaar, H.AR & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.